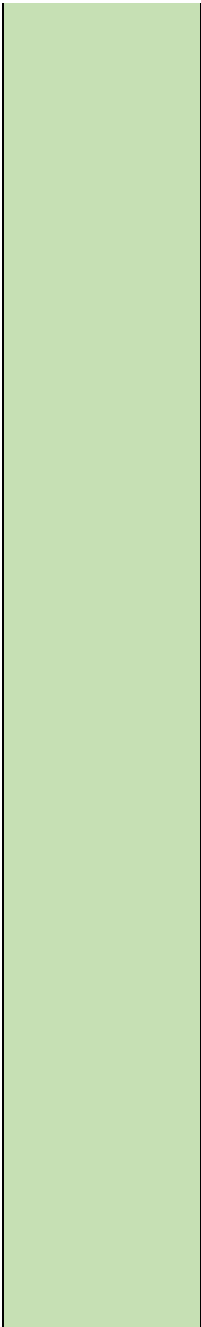
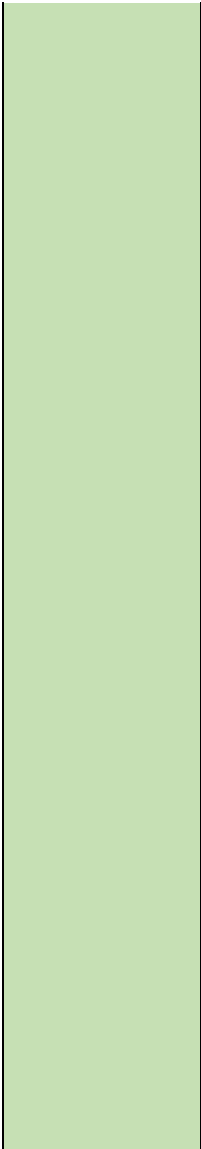


RENCANA AKSI TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

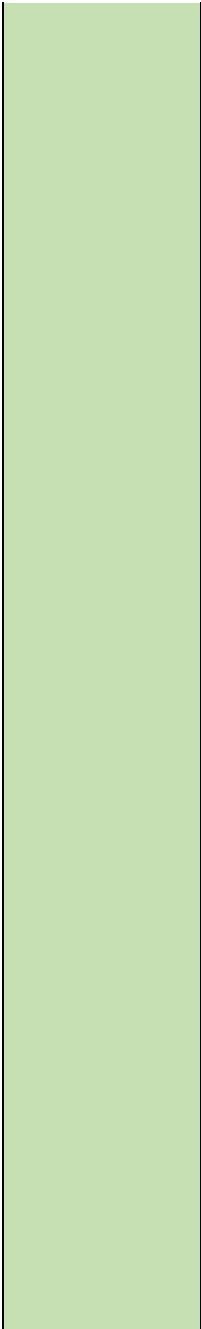
Sasaran strategis	indikator kinerja	target	sasaran program	indikator	target	Aksi	penjelasan kinerja	sasaran kegiatan	indikator	target	Aksi	Penjelasan kinerja
Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Organisasi yang profesional	Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal	73,8	Meningkatnya layanan penunjang SKPD	Persentase layanan penunjang yang dilaksanakan	100%	Paparan Program kerja 2024	Menentukan 100% Target yg telah disepakati, ini diharapkan penyelesaian program pelayanan terselesaikan untuk pelayanan umum.					
	Persentase peningkatan kapasitas aparatur perencana dan pelayanan administrasi perkantoran	100%						Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yg dihasilkan	6 Dok	Melakukan penyusunan dokumen2 penganggaran dan evaluasi Kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2024, serta Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kominfo Tahun 2024, Penyusunan LKjIP 2024 dan dokumen lainnya
					TW I = 25%					TW I = 3	Menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2024, serta Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kominfo Tahun 2024, Penyusunan LKjIP 2024	Dokumen selesai sesuai Target, memlalui proses pengumpulan data setiap bidang dan dirapatkn melalui evaluasi kinerja seluruh bidang



		TW II = 25%					TW II = 1	Menyusun RKA 2025 dan dokumen lainnya	Dokumen selesai sesuai Target, melalui proses pengumpulan data setiap bidang dan dirapatkn melalui evaluasi kinerja seluruh bidang dan Penyusunan RKA 2025
		TW III= 25%					TW III= 1	Menyusun RKA Perubahan 2023	Dokumen selesai sesuai Target, melalui proses pengumpulan data setiap bidang dan dirapatkn melalui evaluasi kinerja seluruh bidang dan Penyusunan RKA perubahan 2024
		TW IV = 100%					TW IV= 1	Menyusun Bahan LPPD 2023, Laporan Emonev RKPD	Dokumen selesai sesuai Target, melalui proses pengumpulan data setiap bidang dan dirapatkn melalui evaluasi kinerja seluruh bidang
					Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%	Melakukan penyusunan dokumen dan laporan Keuangan	% pengelolaan adminitrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Kominfo sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



							TW I = 37 orang/bulan	Pencairan Gaji dan TPP ASN rutin setiap bulan	pengelolaan adminitrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Kominfo sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
							TW II = 12 Dok	Melakukan penyusunan dokumen dan laporan Keuangan	Penetapan dan Pencairan Honor Penanggungjawab Keuangan rutin setiap akhir bulan dan penyusunan dokumen2 keuangan
							TW III= 1	Melakukan penyusunan laporan keuangan	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
							TW IV= 1	Melakukan penyusunan laporan akhir tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
					Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah administrasi Kepegawaian	100%	Melakukan pengadaan pakaian dinas	% pengelolaan administrasi barang milik Dinas Kominfo
							TW I =		
							TW II =		
							TW III= 68 paket		Pengadaan pakaian seragam olahraga
							TW IV= 100%		



					Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah operasional administrasi Umum	100%	Melakukan pelayanan administrasi umum, perjalanan dinas, penyediaan logistik dan peralatan kantor lainnya.	% layanan administrasi umum internal Dinas Kominfo
							TW I = 47 paket	Pengadaan peralatan listrik kantor	Pemenuhan kebutuhan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, dan Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor Dinas Kominfo
							TW II = 12 bulan/lap	Penyediaan layanan SPPD dan makan minum rapat dan tamu Diskominfo	Pemenuhan kebutuhan biaya perjalanan dinas, transportasi dan penginapan untuk keperluan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dan Pemenuhan kebutuhan makan minum rapat dan tamu Dinas Kominfo
							TW III= 10 paket	Pengadaan peralatan kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga Dinas Kominfo
							TW IV= 12 dok	Tersedianya layanan kebutuhan penggandaan / cetak	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kominfo

					Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	Melakukan penyediaan ATK, Komputer, AC, dan Mebeuler dan aset tak berwujud	% pengadaan barang Dinas Kominfo sesuai rencana kebutuhan
							TW I = 1 unit	Pengadaan peralatan kerja	Pemenuhan kebutuhan peralatan kerja dan mesin kantor
							TW II =		
							TW III=		
							TW IV= 100%		
					Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	100%	Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan	% pemeliharaan barang milik Dinas Kominfo
							TW I = 4 unit	Penyediaan servis kendaraan Diskominfo	Pemeliharaan/ servis berkala dan penggantian suku cadang kendaraan dinas/ operasional
							TW II = 39 unit	Penyediaan serviis peralatan kerja	Pemeliharaan/ servis berkala peralatan kerja dan mesin kantor
					Melakukan pelayanan Sarana dan Prasarana yg memadai.		TW III= 1 unit	Perbaikan atau renovasi kantor	Perencanaan pemeliharaan Gedung dan Proses pengadaan barang/jasa pemeliharaan gedung Kantor
							TW IV= 2 unit	Penyelesaian pajak kendaraan	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/ Operasional

Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan informasi daerah	Indeks Sistik Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	3 (baik)	Pengembangan Infrastruktur Teknologi	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	30%	Menyediakan Pembangunan Jaringan Intra pemerintah daerah	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan intra Pemda	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yg memadai	Persentase Sarana dan Prasarana IT dan Komunikasi di SKPD	85%	Melakukan pelayanan Sarana dan Prasarana yg memadai.	Pembangunan jaringan intra pemerintah daerah (jaringan fiber optic)	
										TW I = 2	Melakukan Pendataan OPD yang terlayani Sistik Komunikasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
											TW II =		
											TW III=		
											TW IV= 85%	layanan Internet OPD	Pengelolaan Internet dan Intranet.
									Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	30%	Pendataan Sub Domain dan Hosting	Fasilitas, Pembinaan dan pengawasan domain dan sub domain Pemkab Gowa
											TW I = 2	Terintegrasinya Sistik Aplikasi SKPD	Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur.
											TW II = 2	Terintegrasinya Sistik Aplikasi SKPD	Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur.
											TW III= 30	Pendaftaran Sub Domain dan Hosting	Meningkatnya permintaan sub domain dan hosting
											TW IV= 30%	Pendataan OPD yg menggunakan Sub domain dan Hosting	Meningkatnya OPD yg menggunakan Sub domain dan Hosting
			Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM yg kompeten	Persentase Kuantitas dan Kualitas SDM yang kompeten	70%	Mengikutkan Pelatihan Peningkatan SDM di bidang TIK	% ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	Tersedianya Tenaga IT yg memiliki Sertifikat	Tersedianya Tenaga IT yg memiliki Sertifikat	100%	Pelaksanaan Paelatihan	Terlaksananya Peningkatan SDM dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	

							TW II = 10	ASN yg ikut Pelatihan	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
							TW III=		
							TW IV= 100%		Terlaksananya Peningkatan SDM dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
					Tersedianya Tenaga yang kompeten di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah ASN Yang Kompeten	46%	Tenaga IT yg bersertifikat pengelola Bidang IT Diskominfo	Terlaksananya Peningkatan ASN yg kompeten di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
							TW I =		
							TW II =		
							TW III= 39		Terlaksananya Peningkatan SDM dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
							TW IV= 46%		
Pengembangan e- Government.	Persentase aplikasi layanan public terintegrasi	85%	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.	% layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.	Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/ dikelola.	1 aplikasi	Penggunaan Aplikasi berbagi pake yg sudah terintegrasi	% perangkat daerah yang mengimple-mentasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

							TW I = 1 dok	Pendataan OPD yang terlayani Sistik Komunikasi	Meningkatnya sistim komunikasi intra Pemerintah daerah
							TW II =		
							TW III= 1 dok	laporan yg tersusun	Dokumen
							TW IV= 100%	pengembangan dan pengelolaan Sumber daya TIK	Meningkatnya sumber daya teknologi Informasi dan Komunikasi
						Meningkatnya Kualitas Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah	20%	Tercapainya Maturitas / kematangan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE minimal level 3	% Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik
							TW I = 10	Pengelolaan basis data	Tersedianya basis data yang dikelola dan telah terintegrasi
							TW II = 20	Pembuatan cetak Biru / Rancangan Aplikasi	Tersedianya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
							TW III= 1	Analisis resiko celah keamanan sistim informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
							TW IV = 20%	Koordinasi SPBE Antara OPD	Tersedianya dokumen data SPBE

	Nilai keterbukaan Informasi Publik	90,1 (Informatif)	Meningkatnya layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Pencapaian Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	% Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.	Persentase sasaran penerima informasi daerah	3 dokumen	Melakukan peliputan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gowa	% Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah		
											TW I = 1 dokumen	Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah melalui media yang ada di Kominfo kab Gowa	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
												TW II = 1 laporan	pelayanan Informasi Publik Dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik
												TW III= 1 laporan	Tersedianya Bahan Informasi Daerah untuk Komunitas Masyarakat / Mitra Dalam Menyebarkan Informasi Daerah	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan
												TW IV= 1 laporan	Tersedianya Monev PPID	Optimalnya pengelolaan Komisi Informasi/PPID

Meningkatnya kualitas pelayanan data sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	level 1	Meningkatnya Pemanfaatan Statistik Sektoral Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dirilis/ diunggah Perangkat Daerah ke portal data Kab Gowa	% ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dirilis/ diunggah Perangkat Daerah ke portal data kendali	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD	50%	Tersedianya data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dianalisis dan diseminasi serta diunggah ke portal data Daerah (Penyediaan data statistik sektoral terintegrasi dalam rangka satu data)	1) Koordinasi, sinkronisasi dan pengumpulan data statistik sektoral ; 2) Forum 1 Data kab gowa			
											TW I = 1 dokumen	Pengumpulan data sektoral Kab. Gowa	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
													TW II = 54 OPD	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terkordinasinya Pengumpulan dan Pengolahan Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral yang Sinkron dengan BPS
													TW III= 1 laporan	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya meta data statistik sektoral
													TW IV= 1 laporan	Melakukan Open Data (Publikasi)	Terlaksananya open data (yg dipublikasikan)

					Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Berkualitas, Berbagi Pakai, Lengkap, Akurat, Relevan, Mutakhir, Dan berkesinambungan Sebagai Acuan Dasar Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral sebagai sarana data yg digunakan seluruh OPD	% organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
							TW I = 2	Adanya Tenaga yang Kompeten	Terlaksananya Peningkatan SDM Statistik Sektoral
							TW II = 54 OPD	Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Pelatihan Admin Data Seluruh Perangkat Daerah
							TW III= 1 laporan	Adanya Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
							TW IV= 1 laporan	Monev data sektoral	Monitoring dan Evaluasi Metada Statistik Sektoral

Meningkatnya Keamanan Data Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Meningkatnya layanan persandian Untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah	Persentase Tingkat keamanan informasi pemerinta	100%	Melakukan pengawasan persandian di Kab. Gowa	% sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsi- pprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah	Persentase PD yang menerapkan prinsip sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	54 OPD	OPD yang menerapkan SMKI (Sistem manajemen keamanan informasi)	Melakukan Self assesment indeks KAMI	
									TW I = 100%	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tata kelola Layanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	
										TW II = 100%	Partisipasi ASN Aktif dalam kegiatan Pelatihan Siber dan Sandi	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
										TW III= 100%	Tersedianya data Sistem Elektronik/Aplikasi OPD yang telah Menerapkan prinsip SMKI	Meningkatnya Layanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
										TW IV= 100%	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Meningkatnya Keamanan SE dan Informasi Non Elektronik

							Optimalnya Layanan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Antar Perangkat Daerah berdasarkan PHKS Yang ditetapkan	Persentase PD Pengguna Layanan Yang terhubung Dalam Jaring komunikasi Sandi	54 OPD	Tersedianya peralatan Sandi untuk Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi	Pegembangan, pemeliharaan dan evaluasi penyelenggaraan jaring komunikasi sandi pemda kabupaten Gowa
									TW I = 1 dok	Tersedianya peralatan Sandi untuk Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi	Terlaksananya analisis kebutuhan pengelolaan sumber daya JKS
									TW II =		
									TW III=		
									TW IV= 100%	Tersedianya data Kunci Sistem Sandi	Terlaksananya operasionalisasi JKS untuk perlindungan Informasi berklasifikasi

Catatan :

1. Kinerja yang ditargetkan di akhir triwulan IV pada sasaran program dan kegiatan mohon agar mengisi rencana aksi atau output dari proses antara di setiap TW1 sampai TW3.
2. Tidak disarankan mengisi target 25% setiap triwulan. Kecuali 25% tersebut dapat diukur dengan spesifik atau dibandingkan dengan angka
3. Penetapan target setiap triwulan merupakan akumulasi dari triwulan sebelumnya
4. Jika target program berupa persen (100%) di akhir triwulan 4 maka rencana aksi / output proses TW1-TW 3 tidak meski sama dengan satuan %
5. Contoh penjelasan kinerja = Target 2 dokumen perencanaan. Penjelasan kinerja = dokumen Renja dan RKA

Sungguminasa, 2 februari 2024

